

## ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan dengan cara cara lama, seperti melakukan interaksi langsung antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar-pemerintah baik di Pusat maupun di daerah sudah tidak relevan untuk diteruskan dalam situasi pandemi *Covid-19*. Situasi saat ini harus dapat dijadikan momentum untuk menggiatkan programe *e-government* di Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah menjadi pioner mewujudkan perilaku *e-government*. Perilaku tersebut ditunjukkan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perilaku yang memperlihatkan administrasi publik tradisional harus sudah ditinggalkan. Masyarakat Sumedang sendiri dalam perkembangan saat ini sudah dapat dikatakan siap dengan perilaku literasi digital. Kekurangan di daerah 3T dan biaya dapat diatasi dengan intervensi pemerintah.

Data yang dikumpulkan berupa deskriptif dan akan dibandingkan dengan teori yang sudah ada untuk menguatkan teori tersebut atau menemukan teori baru. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh secara statistik atau bentuk hitungan dan bertujuan untuk mengungkapkan gejala melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci Penerapan kebijakan *e-Government* di Pemerintah Sumedang belum optimal dan dikatakan sempurna dilaksanakan terlihat dari belum adanya situs web yang dimiliki beberapa intansi dan beberapa intansi desa tersebut serta kemampuan perangkat desanya yang kurang mampu dalam menerapkan kebijkana *e-Government*.

Pelaksanaan SPBE internal banyak aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan sebagaimana terdapat beberapa keunggulan pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, dan Layanan Administrasi

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini terjadi dinamika yang saling berinteraksi mempengaruhi satu sama lain. Temuan baru pada 4 aspek tersebut yakni muncul 3 komponen pendukung *Support, Value, Capacity* sehingga dinamika *e-government* dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam kerangka *e-government* lebih dapat berkembang. Selanjutnya siklus terintegrasi ini menghasilkan keluaran atau *outcomes*. Aksi integrasi bisa berbentuk hasil yang bersifat sementara (*intermediate outcomes*), keputusan. Peraturan regulasi dan berbagai kebijakan bersama yang dibuat secara konsesus, kesepakatan untuk melakukan pekerjaan demi kepentingan bersama.

**Kata Kunci : Governance, E-Government, SPBE, Sumedang.**